

PEMERINTAHAN KESHOGUNAN DI JEPANG TAHUN 1192-1867

Edy Supriyadi, Sri Handayani, Sumardi.

Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: umamahnurul@ymail.co.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah agama Shintoisme adalah agama yang tertua dan dapat dianggap sebagai agama pribumi di Jepang. Dalam ajaran Shintoisme, Jepang harus dipimpin oleh seorang Kaisar, sedangkan pada masa keshogunan, Jepang dipimpin oleh seorang Shogun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam tentang pemerintahan keshogunan di Jepang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sejarah dengan metode penelitian sejarah. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah (sumber). Antara tahun 1192 sampai tahun 1867 Jepang tidak diperintah oleh seorang Kaisar melainkan oleh seorang Shogun, hal ini bertolak belakang dari ajaran Shintoisme bahwa Jepang harus dipimpin oleh seorang Kaisar. Kaisar hanya sebagai simbol atau lambang negara dan spiritual saja.

Kata kunci: Pemerintahan, Keshogunan, Jepang

ABSTRACT

The background research is religion Shintoism is the oldest religion and can be regarded as an indigenous religion in Japan. In the teachings of Shintoism, Japan should beheaded by an emperor, whereas at the time of the shogunate, Japan led by a Shogun. The purpose of this research is to analyse more in depth about the reign of the shogunate in Japan. This type of research is historical research in methods of historical research. The collection of data in this study is to search for and collect the materials or traces of history (source). Between the years 1192 to 1867 Japan not ruled by an emperor but rather by a Shogun, it is opposite of the teachings of Shintoism that Japan should be headed by an emperor. Only the emperor as a symbol or coat of arms and titles only.

Keywords: Government, the Shogunate, Japan

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1868, Jepang merupakan negara yang penuh pergolakan dalam negeri, sering terjadi perang saudara atau perang antar klan samurai untuk memperebutkan kekuasaan di Jepang. Pada awalnya kaum samurai dimulai oleh keluarga Yamato, yang muncul sebagai klan terkuat di Jepang pada abad ketujuh masehi. Kata samurai berarti "*orang yang melayani*" dan diberikan kepada mereka yang lahir di keluarga terhormat dan ditugaskan untuk menjaga anggota keluarga Kekaisaran (Handayani, 2014:53).

Jepang semula dipimpin oleh Kaisar, dalam perkembangannya diganti oleh pemerintahan Shogun. Akar terbentuknya kemaharajaan (kekaisaran) Jepang muncul pada masa wangsa Yamato, yang mempersatukan bangsa Jepang menjadi satu bangsa yang lebih sadar akan kesatuannya itu (Mattulada, 1979:43-44). Jimmu Tenno adalah Kaisar pertama Jepang. Keluarga Yamato kesulitan dalam mempertahankan pemerintahan sentralisasi negara dan mulai mendelegasikan tugas militer, administrasi, dan penarikan pajak kepada mantan-mantan pesaing yang berfungsi sebagai gubernur. Saat pemerintahan Yamato lemah, gubernur-gubernur lokal semakin kuat, mandiri dan secara perlahan meningkatkan anggota pasukan samurainya.

Di antara beberapa agama yang dianut oleh orang Jepang, Shintoisme adalah agama yang tertua dan dapat dianggap sebagai agama pribumi orang Jepang. Berbeda dengan agama Budha, Konfusianisme, Katholik, Protestan, Islam, yang masuk pada jaman sejarah, agama Shinto tidak diketahui kapan mulai muncul. Kata Shinto berasal dari bahasa China yang berarti jalan para dewa, pemujaan para dewa, pengajaran para dewa, atau agama para dewa. Shin berarti kami, yaitu dewa, dan to berarti jalan. Meskipun mempunyai satu nama, agama ini merupakan gabungan kepercayaan primitif yang sukar untuk digolongkan menjadi satu agama, bahkan sebagai suatu sistem kepercayaan. Oleh karena agama ini lebih tepat dianggap sebagai suatu gabungan dari kepercayaan primitif dan praktek-praktek yang berkaitan dengan jiwa-

jiwa, roh-roh, hantu-hantu, dan sebagainya. Dalam ajaran Shintoisme, Jepang harus dipimpin oleh seorang kaisar, sedangkan pada masa keshogunan, Jepang secara militer dipimpin oleh seorang shogun. Kaisar hanya memerintah secara sipil saja.

Pada masa zaman Heian yang menonjolkan peranan keluarga Fujiwara sebagai pemegang kekuasaan di Jepang ternyata membawa Jepang berada jauh dari kemakmuran. Pemerintahan Keluarga Fujiwara yang kurang memperhatikan nasib rakyat dan menggunakan sistem pembagian tanah kepada biara, kuil, pegawai tinggi, dan bangsawan tanah-tanah yang luas bebas dari pajak secara tidak langsung sangat berdampak pada perekonomian rakyat Jepang yang diakibatkan sistem pungutan pajak yang sangat memberatkan rakyat kecil. Di sisi lain, kaum bangsawan sangat menuai kemakmuran.

Permasalahan yang dibahas adalah.

1. Bagaimana latar belakang dan awal munculnya pemerintahan Shogun di Jepang?
2. Bagaimana sistem pemerintahan Shogun di Jepang?
3. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan Shogun di Jepang?
4. Bagaimana berakhirnya pemerintahan Shogun di Jepang?

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Mengkaji lebih mendalam tentang latar belakang dan awal munculnya pemerintahan Shogun
2. Menganalisis lebih mendalam tentang sistem pemerintahan Shogun
3. Mengkaji lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Shogun
4. Menganalisis lebih mendalam tentang berakhirnya pemerintahan Shogun

Manfaat penelitian ini adalah.

1. Penulis, untuk memperdalam tentang Asia Timur khususnya mengenai pemerintahan keshogunan di Jepang.
2. Ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu sejarah.
3. Masyarakat umum, agar dapat menambah wawasan tentang sejarah dunia khususnya mengenai sejarah yang terjadi di Asia Timur.
4. FKIP Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (Gottschalk, 1986:32). Metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau masa lalu (Nawawi, 1983:78).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pemecahan masalah secara kritis berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses historiografi. Prosedur penelitian sejarah ada empat langkah yaitu: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi (Notosusanto, 1971:17).

1. Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian ini, adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti menemukan sumber-sumber (Notosusanto, 1971:18).

Pada kegiatan ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah (sumber) yang berkaitan dengan materi Pemerintahan Keshogunan di Jepang Tahun 1192-1867, baik berupa buku, laporan penelitian, skripsi, maupun dokumen. Penulis berusaha mengumpulkan sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Kritik

Setelah penulis menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah kedua adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber adalah menilai, menguji atau menyelidiki jejak-jejak sebagai usaha untuk mendapatkan jejak-jejak asli serta sumber-sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta mengandung informasi yang relevan untuk cerita sejarah yang akan disusun (Sjamsuddin, 1996:103).

Pengujian sumber sejarah dimaksudkan agar di dapat fakta-fakta sejarah. Karena sumber sejarah pada dasarnya masih merupakan bahan-bahan mentah agar menjadi suatu fakta sejarah. Kegiatan kritik sumber sejarah dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian dari sumber dan kritik intern dilakukan bahwa kesaksian sumber tersebut dapat dipercaya sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang benar.

Pada tahap kritik ini penulis melakukan perbandingan sumber yang didapat agar penulis memperoleh sumber-sumber yang mengandung informasi yang akurat dan benar. Tujuan akhir dalam melakukan kritik adalah melaksanakan otensitas dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Interpretasi

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta-fakta sejarah sedemikian rupa sehingga masing-masing fakta sejarah saling berhubungan atau terkait menjadi rangkaian yang logis dan bermakna (Notosusanto, 1971:17).

Pada tahap interpretasi ini peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan pemerintahan keshogunan di Jepang, kemudian fakta-fakta tersebut disusun secara kronologis dan sistematis sehingga dapat menjadi sebuah cerita sejarah.

4. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi adalah puncak dari suatu penelitian sejarah dan bagian dari metode sejarah yaitu penyusunan hasil interpretasi atas fakta-fakta yang telah disesuaikan secara analisis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (Notosusanto, 1971:24).

Kegiatan historiografi bertujuan untuk menyajikan hasil interpretasi dalam kisah sejarah secara tertulis. Proses historiografi memerlukan kreatifitas mutu imajinatif dan penulisan yang hendaknya objektif atau dengan kata lain penyampaian hasil rekonstruksi imajinasi dengan ilmiah yakni dengan penulisan fakta-fakta sejarah menjadi kisah sejarah yang selaras. Historiografi yang dilakukan penulis adalah menulis cerita sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah dari hasil heuristik, kritik, dan interpretasi. Penulis dalam langkah historiografi menggunakan bahasa yang baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan selama penelitian.

A. latar belakang dan awal munculnya pemerintahan Shogun di Jepang

1. Bidang politik

Pada masa zaman Heian tersebut menonjolkan peranan keluarga Fujiwara. Keluarga Fujiwara termasuk golongan aristokrat yang selanjutnya mempunyai pengaruh besar terhadap kaisar-kaisar Jepang (Lan,1962:44). Keluarga Fujiwara memiliki pengaruh sangat besar dalam sejarah Jepang, karena putri dari keluarga Fujiwara banyak yang menjadi istri Kaisar. Keluarga Fujiwara akan menjadi wali apabila Tenno dalam keadaan sakit, apabila anak yang dimiliki adalah perempuan atau putra mahkota masih kecil, maka keluarga Fujiwara akan menjadi Mangkubumi (Sessho), selain itu keluarga Fujiwara pun biasa menjadi penasihat Tenno (Kampaku) dalam menjalankan pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini kurang memperhatikan kemakmuran negara dan lebih mengutamakan kemakmuran keluarga Fujiwara sendiri. Keluarga Fujiwara menjadi sangat gila akan kekuasaan, hal ini membuat daimyo lain membenci keluarga Fujiwara.

Kedudukan keluarga Fujiwara makin lama semakin teguh. Pada tahun 857 seorang kepala keluarga Fujiwara, Fujiwara Yoshifusa diangkat menjadi perdana menteri oleh Kaisar Montoku (827-858). Jabatan perdana menteri dipangku Fujiwara Yoshifusa sampai tahun 872. Disamping jabatan tinggi ini, Fujiwara Yoshifusa diberi kedudukan wali pada tahun 866 dibawah Kaisar berikutnya Kaisar Seiwa (850-880). Fujiwara Yoshifusa adalah orang pertama yang diangkat dalam kedudukan tinggi itu meskipun Fujiwara Yoshifusa bukan seorang keluarga Kaisar. Sejak tahun diangkatnya Fujiwara Yoshifusa menjadi wali maka kekuasaan keluarga Fujiwara menjadi sangat besar, sehingga ada yang menyebut bahwa pada tahun 866-1160 sebagai Zaman Fujiwara.

Keadaan negara makin lama makin kacau, Kaisar menganggap bahwa semua kekacauan dikarenakan keluarga Fujiwara mengambil alih kekuasaan Kaisar, akhirnya Kaisar berusaha mengurangi pengaruh dari keluarga Fujiwara.

2. Bidang Sosial dan Ekonomi

Peraturan bahwa semua tanah dijadikan milik negara dan dibagikan sama rata kepada rakyat untuk diusahakan sebagai salah satu tindakan dalam pembaharuan Taikwa hanya tinggal teori belaka, dalam prakteknya hal itu tidak banyak terlihat. Kepada biara-biara dan kuil-kuil dihadiahkan tanah yang luas-luas, yang dibebaskan dari pajak. Pegawai-pegawai tinggi dan bangsawan juga ada kesempatan memiliki tanah-tanah yang luas bebas dari pajak. Tanah-tanah luas milik perseorangan yang bebas dari pajak itu disebut sho atau shoen. Dalam perkembangannya shoen menjadi milik turun menurun. Perluasan tekanan pajak di daerah-daerah diluar shoen makin besar dan yang harus memikul beban adalah rakyat para petani kecil. Untuk menghindari beban yang terlalu berat, pemilik-pemilik tanah kecil lebih suka melepaskan hak nominal atas tanahnya dan menyerahkannya kepada seorang bangsawan terkemuka, kemudian menganggap bangsawan tersebut sebagai majikannya, dan ia sendiri jadi penggarap tanahnya. Pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara lebih ringan, tetapi masuk kedalam kantong penguasa shoen. Tanah-tanah shoen makin luas dan tanah untuk umum makin berkurang, akibatnya penghasilan negara makin sedikit, sedangkan kekayaan golongan bangsawan makin bertambah. Konsekuensi lebih lanjut negara menambah beban pajak rakyat petani dan untuk menghindarkan diri dari beban yang terus menerus makin berat, maka jumlah orang-orang yang lebih suka menyerahkan tanahnya kepada golongan bangsawan makin besar. Sistem shoen itu diibaratkan seperti bola salju yang berguling melalui lereng bersalju, makin lama makin besar, tumbuh menjadi raksasa. Tuan-tuan tanah (penguasa shoen) bukan hanya bebas dari pajak saja tetapi juga mempunyai hak istimewa untuk memerintah sendiri daerah yang meliputi tanahnya, sehingga shoen mempunyai kedudukan eksteritorialiteit, dalam realitasnya daerah-daerah tersebut merdeka yang punya pemerintahan sendiri, semacam *imperia in imperio*. Maka terbentuklah feodalisme yang jadi dasar pemerintahan orang-orang bangsawan. Akibat dari sistem shoen para daimyo di daerah semakin kaya dan kuat,

sedangkan penghasilan negara semakin berkurang yang mengakibatkan melemahnya pemerintahan di pusat.

B. sistem pemerintahan Shogun di Jepang

Jepang pra-modernisasi, yaitu pada era feodal (1185-1603) pemerintahan Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang menempatkan Shogun sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh, sedangkan kaisar hanya sebagai simbol pimpinan struktur bernegara (Ishii, 1988:47). Periode ini diawali oleh Minamoto no Yoritomo yang membangun sistem pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Bakufu atau pemerintahan Shogun. Shogun yang pertama dikenal dengan nama Kamakura bakufu di Kamakura pada tahun 1192. Model pemerintahan shogun terdiri dari dua divisi utama yaitu divisi samurai dan divisi pengadilan atau hukum.

Para Shogun diberikan kekuasaan militer oleh kaisar dan mereka juga dibantu oleh para daimyo yang merupakan tuan tanah semenjak abad ke-10 hingga awal abad ke-19. Para daimyo memiliki hak kepemilikan tanah secara turun-temurun dan bahkan tentara untuk melindungi tanah dan pekerjanya. Daimyo pada masa Kamakura disebut Gokenin dan pada periode Muromachi (1336-1573), kelas Gokenin dihapuskan dan diganti dengan kelas daimyo.

C. kebijakan-kebijakan pemerintahan Shogun di Jepang

1. Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Kamakura Tahun 1192-1333
 - a) Mengadakan jabatan Shugo dan Jito
 - b) Membentuk pemerintahan Bakufu
 - c) Mengadakan Jabatan Shikken
2. Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Muromachi Tahun 1333-1573
 - a) Membentuk jabatan Kanrei (Penasehat utama Shogun)
 - b) Mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina dan Korea

c) Mengatur kepemilikan tanah

3. Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Azuchi Momoyama Tahun 1573-1603

- Kebijakan Pemerintahan Sipil (menentukan pembagian tanah pertanian serta jumlah produksi pertanian, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar)
- Kebijakan Militer (penguasaan negara dengan kekuatan militer)
- Kegiatan Beragama (membantu masuknya misionaris-misionaris Ordo Jesuit ke Jepang untuk menyebarkan agama Kristen)
- Kebijakan Terhadap Istana (ikut membantu dalam soal keuangan dan turut campur dalam pengambilan keputusan di istana)
- Kebijakan Perdagangan (menjalankan politik pasar bebas (*rakuichi rakuza*))
- Kebijakan Luar Negeri (memaksa Korea membayar upeti kepada Jepang)
- Kebijakan kepegawaian (mengangkat pengikut berdasarkan prestasinya)

4. Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Tokugawa Tahun 1603-1867

- Mengawasi Para Daimyo
- Mengawasi hubungan dengan Kaisar
- Penerapan Politik Isolasi (*Sakoku*)
- Membagi Status Sosial Dalam Masyarakat

D. berakhirnya pemerintahan Shogun di Jepang

Bakumatsu adalah sebutan dari suatu periode dalam sejarah Jepang yang merujuk kepada tahun-tahun terakhir zaman Edo (Era Tokugawa) menjelang runtuhnya Keshogunan Tokugawa. Periode ini dimulai dari peristiwa kedatangan Kapal Hitam (1853) hingga Perang Boshin (1869). Dalam periode Bakumatsu terjadi peristiwa bersejarah yakni berakhirnya kebijakan isolasi yang disebut *sakoku* dan masa transisi dari pemerintahan feodal Keshogunan ke Pemerintahan Meiji.

Shogun Tokugawa berpegang pada tradisi kuno yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Amaterasu

Omokami dan memerintah dengan tangan besi. Pemerintahan Shogun selalu menentang aktifitas dan inisiatif dari setiap individu. Semua aktifitas diawasi oleh pemerintahan Bakufu. Pada pertengahan abad 19, pemerintah Shogun Tokugawa menghadapi keruntuhannya. Ada dua aspek yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Tokugawa, yakni.

1. Aspek luar Negeri

Pada tahun-tahun sebelum pembukaan Jepang oleh bangsa-bangsa Barat, perhatian Eropa dan Amerika Serikat telah mulai tertuju ke arah Timur Jauh guna mencari tempat perdagangan yang lebih menguntungkan, terlebih setelah bangsa-bangsa Barat berhasil membagi-bagi negara Cina dengan menanamkan pengaruh dan mengeksploitasi mereka. Di Cina hanya sebuah pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan dengan bangsa asing, yakni Canton.

Pada akhir abad 18 dan permulaan abad 19, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menguasai lautan Pasifik Utara, akibat berkembangnya perdagangan, setelah Revolusi Industri. Amerika Serikat mengadakan ekspansi ke Amerika Utara. Oregon dan California dapat diduduki Amerika Serikat pada tahun 1840-1854. Setelah keberhasilan itu maka konsentrasi mereka ditujukan kepada Jepang. Letak geografis dan sumberdaya alam Jepang yang strategis dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi bangsa Barat, yaitu dengan cara menjadikan Jepang sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan tempat penanaman modal. Faktor lain yang mendorong Amerika Serikat ingin membuka Jepang agar pemerintah Jepang mau melindungi awak kapal Amerika Serikat yang terdampar di pantai Jepang.

Pemerintah Tokugawa hanya memberikan kayu dan air minum terhadap kapal-kapal asing yang singgah. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menginginkan pembukaan beberapa pelabuhan Jepang, disamping sebagai tempat persinggahan untuk mengisi perbekalan dan bahan bakar juga untuk kepentingan perdagangan.

Pada tahun 1837, kapal Amerika Serikat “The Morison” yang bertolak dari Makao menuju Jepang, disambut dengan tembakan-tembakan pengusiran oleh pendukung Bakufu di teluk Edo. Akibatnya kapal tersebut kembali ke Canton. Jepang juga tidak memberikan toleransi kepada kapal-kapal yang terdampar atau kandas di perairan Jepang. Awak kapal tersebut akan diperlakukan dengan kasar, kadang-kadang disiksa dan dibawa ke Nagasaki kemudian dikembalikan ke negerinya.

Pada tahun 1846 Amerika Serikat mengutus Komodor Biddle untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan Jepang, namun ditolak. Kegagalan ini dikarenakan oleh sikap Komodor Biddle yang terlalu lemah dan sopan sehingga masyarakat Jepang menganggap orang Amerika lemah.

Pada tanggal 8 Juli 1853 Komodor Matthew Calbraith Perry dari Amerika Serikat adalah orang yang pertama kali tiba di Jepang untuk merintis hubungan dagang dengan Jepang. Komodor Matthew Calbraith Perry datang dengan membawa empat kapal yaitu Missisipi, Plymouth, Saratoga, dan Susquehanna. Para pengikut Bakufu sangat heran melihat kedatangan kapal dengan senapan meriam-meriam tersebut, maka mereka menyebutnya “Kapal Hitam” (Kuro Fune). Komodor Matthew Calbraith Perry menyampaikan surat dari presiden Amerika Serikat Millard Fillmore yang meminta Jepang untuk membuka diri terhadap perdagangan dengan negara-negara Barat.

Meskipun Presiden Amerika Serikat telah memberikan surat kepada pemerintah Jepang untuk membuka hubungan persahabatan, perdagangan, dan perlindungan bagi korban kapal laut yang karam, pemerintah masih tetap pada pendiriannya. Sehingga surat tersebut ditolak dan Jepang tidak membuka diri bagi bangsa asing terutama bangsa Barat.

Komodor Matthew Calbraith Perry datang untuk yang kedua kalinya pada tanggal 31 Maret 1854. Kali ini Komodor Matthew Calbraith Perry membawa tujuh kapal perang. Hal ini membuat Shogun Tokugawa Iesada setuju

untuk membuat sebuah perjanjian dengan pihak Amerika Serikat. Perjanjian tersebut adalah perjanjian Kanagawa. Kanagawa merupakan sebuah kampung nelayan di Yokohama. Berikut ini adalah isi perjanjian Kanagawa terdiri dari 12 pasal.

Perjanjian-perjanjian lain yang sejenis dibuat pula oleh pemerintahan Bakufu dengan Inggris yang diwakili oleh Laksamana Sterling, pada 14 Oktober 1854 di Nagasaki. Dengan perjanjian ini kapal-kapal Inggris diijinkan berdagang di Nagasaki dan Hokodate. Setelah Jepang melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat, kemudian diikuti dengan Rusia untuk membuat perjanjian dengan Jepang di bawah Komandan Angkatan Laut Rusia Laksamana Putyatin, ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1855 di Shimoda. Perjanjian itu adalah perjanjian Shimoda, isi perjanjian tersebut adalah pembukaan tiga pelabuhan Jepang (Shimoda, Nagasaki dan Hakodate) untuk kapal kapal Rusia.

Tahun 1858 dibuat lagi perjanjian baru dengan Amerika Serikat yaitu perjanjian Townsend Harris, perjanjian tersebut berisi: (1) pertukaran perwakilan diplomat; (2) Kanagawa, Kobe, Nagasaki, Nigata, dan Hokodate dibuka untuk pelabuhan perdagangan bangsa asing; (3) warga Amerika Serikat diperbolehkan untuk tinggal dan berdagang di pelabuhan tersebut; (4) sistem ekstrateritorial yang disediakan untuk menghukum warga asing menggunakan konsulat mereka sendiri bukan sistem hukum Jepang; (5) bea ekspor dan impor sesuai dengan pengawasan internasional; (6) missionaris diberi hak untuk melakukan pengajaran (Suradjaja, 1984:18-19).

Politik isolasi yang dipertahankan oleh pemerintahan Bakufu berakhir. Jelas pula bahwa pembukaan Jepang bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan paksaan dari luar. Dengan runtuhnya politik isolasi ini, maka golongan Samurai yang telah tiga setengah abad lamanya mengakui supremasi pemerintahan Bakufu di bawah keshogunan Tokugawa akhirnya mulai sadar bahwa pemerintahannya adalah lemah, militernya tidak mampu lagi menahan serangan dari luar.

2. Aspek dalam Negeri

Semenjak dibukanya Jepang untuk orang asing, maka timbullah gerakan penteroran yang dipelopori oleh golongan konservatif untuk membunuh orang-orang Barat dan orang Jepang yang mendukung orang Barat. Gerakan penteroran yang dilakukan oleh golongan konservatif tersebut semakin meningkat setelah disetujuinya perjanjian perdagangan dan persahabatan antara Jepang dan bangsa Barat. Perjanjian ini umumnya merugikan pihak Jepang, dimana uang emas yang masuk ke pihak asing lebih besar dibandingkan yang masuk kedalam negeri. Para Chonin (saudagar besar) di sini mendapat keuntungan yang sangat besar.

Menurut Edwin O. Reischauer (dalam Subakti, 2011), “masyarakat Jepang pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) kelompok Shogun yang ingin mempertahankan politik sakoku, namun tidak mampu mempertahankan Jepang dari serbuan bangsa-bangsa Barat, khususnya Amerika Serikat yang ingin membuka politik sakoku Jepang; (2) kelompok terpelajar yang justru ingin menerima masuknya bangsa-bangsa Barat dengan segala perkembangan pengetahuan; dan (3) kelompok daimyo yang menginginkan pengembalian kekuasaan terhadap Kaisar dan pengusiran bangsa-bangsa Barat.”

Shintoisme murni memberikan dasar ideologi bagi gerakan konservatif yang menuntut pengembalian kekuasaan kepada Kaisar, menghendaki penghapusan kekuasaan Shogun, dan pengusiran orang asing. Dalam gerakan ini disiarkan teori tentang bendera “Matahari Terbit” (Hinomaru No Hata), bendera ini merupakan lambang dari gerakan.

Melihat situasi politik Jepang yang semakin meruncing, maka pada tanggal 8 November 1867 Shogun Tokugawa Yoshinobu bersedia menyerahkan kekuasaan politik kepada Kaisar. Yoshinobu menyadari bahwa tidak ada gunanya mempertahankan kekuasaan keshogunan lagi. Pada bulan Januari 1868 diadakan permusyawaratan

di Kyoto antara Kaisar, Shogun, dan para Daimyo. Maka dikeluarkan keputusan bahwa Keshogunan dihapus dan Shogun diperintahkan untuk menyerahkan semua kekayaan dan tanah kepada Kaisar, dengan demikian berakhirilah kekuasaan shogun yang menguasai Jepang selama lebih dari enam setengah abad.

Selama 250 tahun lebih kepulauan Jepang di isolasikan dari hubungan dengan bangsa-bangsa lain oleh kekuasaan Tokugawa. Tetapi, lambat laun politik isolasi tidak dapat di pertahankan. Ketika armada Amerika Serikat yang dipimpin oleh Komodor Perry membuat perjanjian persahabatan dengan Jepang dan mengancam dengan meriamnya yang dapat menghancurkan Edo dan akhirnya pintu dibuka. Pada tahun 1858 konsul AS yaitu Townsend Harris berhasil memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian dagang. Keadaan ini sangat tidak disukai oleh rakyat Jepang karena pertama kalinya dalam sejarah Jepang bangsa asing dapat menunjukkan kekuasaannya di bumi Jepang. Rakyat Jepang menganggap hal ini Terjadi karena Tokugawa tidak memenuhi fungsinya sebagai shogun, yaitu memberi perlindungan kepada bangsa Jepang. Sebagai akibat dari ketidaksukaan rakyat terhadap kebijakan Shogun Tokugawa tentang pembukaan Jepang terhadap bangsa asing di Jepang muncul 2 golongan yang saling bertentangan. Kedua golongan tersebut adalah golongan pendukung shogun dan golongan pendukung kaisar. Golongan pendukung shogun berpendapat bahwa Jepang harus membuka pintunya terhadap orang asing, sedangkan golongan pendukung kaisar menentang bakufu untuk mengadakan hubungan dagang dengan orang asing dan menuntut pengembalian kekuasaan kepada tenno. Golongan ini di wakili oleh Daimyo Tazoma dari suku Satsuma, Chozu, Chothosha dan Hizen dengan golongan yang berbunyi “sonno joi” yang artinya hormati tenno dan usir kaum biadab (barbarian, maksudnya orang orang asing).

Gerakan anti asing tidak dapat dibendung dan meluas ke seluruh negeri. Pada tahun 1862 terjadi insiden

di Namamigi dimana seorang Inggris mati dibunuh oleh salah seorang keluarga Satsuma. Inggris menuntut agar orang-orang Satsuma tersebut dihukum, karena shogun tidak dapat menjawab tuntutan tersebut, mulailah Inggris menembaki pelabuhan Kagozhima ibukota golongan Satsuma. Keluarga Satsuma berhasil dikalahkan dan membayar kerugian kepada Inggris. Keluarga Chosu pada bulan September 1863 menutup pelabuhannya bagi kapal-kapal asing. September 1864 AS, Inggris, Perancis, dan Belanda menembaki pelabuhan Shimonoseki, Chosu dapat dikalahkan dan Shimonoseki harus dibuka untuk asing. Kini sadarlah bangsa Jepang, bahwa bangsa barat tak dapat diusir dengan kekuatan senjata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan awal terbentuknya pemerintahan oleh shogun dikarenakan kondisi negara yang memburuk dan kaisar tidak mampu menguasai pemerintahan, sehingga para daimyo di daerah saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan, dimana daimyo yang paling kuat adalah Klan Taira dan Klan Minamoto. Pada tahun 1156 dan 1159 terjadi pertempuran di Kyoto antara klan Taira yang dipimpin oleh Taira no Kyomori dengan klan Minamoto yang dipimpin oleh Minamoto no Yoshitomo. Peperangan dimenangkan oleh klan Taira. Pada tahun 1183 klan Minamoto menyerang klan Taira dibawah pimpinan Minamoto no Yoritomo dan berhasil mengalahkan klan Taira, sehingga membawa klan Minamoto menjadi orang yang paling berkuasa di Jepang. Pada tanggal 21 Agustus 1192 Minamoto no Yoritomo diangkat menjadi Shogun.

Pada masa keshogunan pemerintahan Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang menempatkan Shogun sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki

kekuasaan penuh, sedangkan kaisar hanya sebagai simbol pimpinan struktur bernegara. Periode ini diawali oleh Minamoto no Yoritomo yang membangun sistem pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Bakufu atau pemerintahan Shogun. Shogun yang pertama dikenal dengan nama Kamakura bakufu di Kamakura pada tahun 1192. Model pemerintahan shogun terdiri dari dua divisi utama yaitu divisi samurai dan divisi pengadilan atau hukum.

Para Shogun diberikan kekuasaan militer oleh kaisar dan shogun juga dibantu oleh para daimyo yang merupakan tuan tanah semenjak abad ke-10 hingga awal abad ke-19. Para daimyo memiliki hak kepemilikan tanah secara turun-temurun dan bahkan tentara untuk melindungi tanah dan pekerjanya. Daimyo pada masa Kamakura disebut Gokenin dan pada periode Muromachi.

Selama menjabat sebagai pemimpin Jepang, pemerintahan keshogunan menerapkan kebijakan-kebijakan, antara lain: (1) Mengatur kepemilikan tanah; (2) membagi status sosial dalam masyarakat; (3) membagikan tanah kepada para daimyo; (4) mengawasi hubungan dengan Kaisar; (5) mengawasi para daimyo; dan (6) menerapkan politik isolasi.

Runtuhnya pemerintahan keshogunan dikarenakan ada dua faktor, yakni: faktor luar negeri, karena datangnya Komodor Perry pada tahun 1853 dan 1854 meminta Jepang untuk membuka diri terhadap dunia luar; dan (2) faktor dalam negeri, karena banyak masyarakat Jepang yang kecewa dengan pemerintahan Shogun karena tidak bisa melindungi tanah Jepang dari masuknya bangsa asing, sehingga muncullah pemberontakan yang dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan Shogun dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar. melihat gerakan penteroran yang dilakukan oleh golongan konservatif terhadap orang Barat yang semakin tidak terkendali sehingga pada tanggal 8 November 1867, Shogun terakhir yaitu Tokugawa Yoshinobu bersedia untuk menyerahkan tampuk kekuasaan Jepang kepada Kaisar.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi mahasiswa sejarah sebagai calon guru sejarah, hendaknya selalu menambah wawasan tentang materi kesejarahn dalam pendidikan sehingga dapat menunjang profesionalismenya sebagai guru sejarah yang profesional.
2. Bagi mahasiswa sejarah penulisan ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan pembaca mengenai sejarah Jepang pada abad pertengahan serta memperkaya pengetahuan mengenai sejarah kawasan, khususnya kawasan Asia Timur yaitu Jepang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Edy Supriyadi mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Handayani, M.M dan Dr. Sumardi, M, Hum yang telah meluangkan waktunya demi terselesainya jurnal ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, S. L. 2012. *Sejarah Asia Timur 1*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [2] Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notokusanto dari Understanding History a Primer of Historical Method*. Jakarta: UI Press.
- [3] Handayani, S. 2014. *Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1568-1945*. Jember.
- [4] Ishii, R. 1988. *Sejarah Institusi Politik Jepang*. Jakarta: Gramedia
- [5] Lan, N. J. 1962. *Djepang Sepandjang Masa*. Jakarta: PT Kinta.
- [6] Mattulada. 1979. *Pedang dan Sempoa (Suatu Analisa Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang)*. Kyoto: Depdikbud.
- [7] Nawawi, H. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yagyakarta: Gadjah Mada University Press.

[8] Notokusanto, N. 1971. *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Jakarta: Dephankam.

[9] Sjamsuddin, H. 1994. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.